



**2022**

# **PANDUAN MONEV PUG/PPRG SAMARINDA**

Presented for :  
**Perangkat Daerah  
Sekretariat  
Bidang/Bagian  
Lembaga Lainnya**

Presented by :  
**POKJA-PUG**

# Monitoring & Evaluasi PUG Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah : .....

.....

Nama Kepala/Pimpinan : .....

Anggota Focal Point : 1. ....

*(Nomor Whatsapp)* (08 .....

2. ....

*(Nomor Whatsapp)* (08 .....

# KOP INSTANSI

## Lembar Pernyataan Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah

Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku (sebutkan nama Pimpinan pada Dinas/Instansi/Kecamatan/Kelurahan) menyatakan siap mendukung implementasi PUG (Pengarusahaan Gender) di Kota Samarinda melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dengan ruang lingkup sebagai berikut;

1. Membangun komitmen selaku pembuat/pelaksana kebijakan.
2. Menyusun kebijakan dan program/kegiatan pada Perangkat Daerah.
3. Menetapkan Anggota Focal Point Perangkat Daerah.
4. Meningkatkan kapasitas SDM anggota Focal Point.
5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan.
6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Demikian Pernyataan Komitmen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, ..... 2023  
Kepala Dinas/Camat/Lurah

*(TTD & Stempel)*

Nama Pimpinan/Kepala  
Pangkat/Golongan  
NIP

# PENDAHULUAN

Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanahkan bagi semua Kementerian dan Lembaga Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender pada saat menyusun kebijakan, program, dan kegiatan masing-masing bidang pembangunan, termasuk monitoring dan evaluasinya.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), dilakukan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender ( PPRG ) adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini akan membantu memberikan informasi tentang proses dan tahapan pelaksanaan PPRG, serta mengidentifikasi kendala-kendala serta kegiatan/intervensi yang diperlukan dalam Upaya perbaikan pelaksanaan PPRG di waktu yang akan datang dengan harapan upaya pelaksanaan PPRG di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilakukan secara lebih efektif.

Melalui pemantauan dan evaluasi yang harmonis dalam hal ini adalah pelaksanaan PPRG, akan dapat dilihat kesesuaian proses dengan apa yang direncanakan, kesesuaian dalam pencapaian tujuan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

# DASAR HUKUM

## PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender kota Samarinda Tahun 2023-2027.

# MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk mendapatkan umpan balik bagi program atau kegiatan yang sedang berjalan dan atau yang sudah dilaksanakan. Panduan ini bertujuan agar kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan.

Tujuan Umum:

1. melihat PPRG sebagai instrumen akuntabilitas publik;
2. mengetahui hambatan dan permasalahan selama proses pelaksanaan PPRG;
3. melihat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PPRG;
4. melihat ketercapaian *output* dan *outcome* pelaksanaan PPRG yang juga merupakan kinerja PD dalam program spesifik (program yang memiliki isu gender);
5. melihat peran aktif PD dalam pelaksanaan PPRG;
6. penentuan kebijakan yang akan datang

Tujuan Khusus:

1. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, antara lain siapa yang melaksanakan PPRG; apakah GBS (*Gender Budget Statement*) dapat diimplementasikan; siapa SDM (Sumber Daya Manusia) yang menguasai; bagaimana interaksi antar komponen atau pembuat (pemangku kepentingan/*stake holder*), apakah GBS dapat direalisasikan dalam DIPA dll;
2. memberikan masukan tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan PPRG;
3. mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan dilaksanakannya PPRG;
4. memberikan informasi yang diperlukan bagi sistem penilaian (evaluasi) pelaksanaan PPRG.

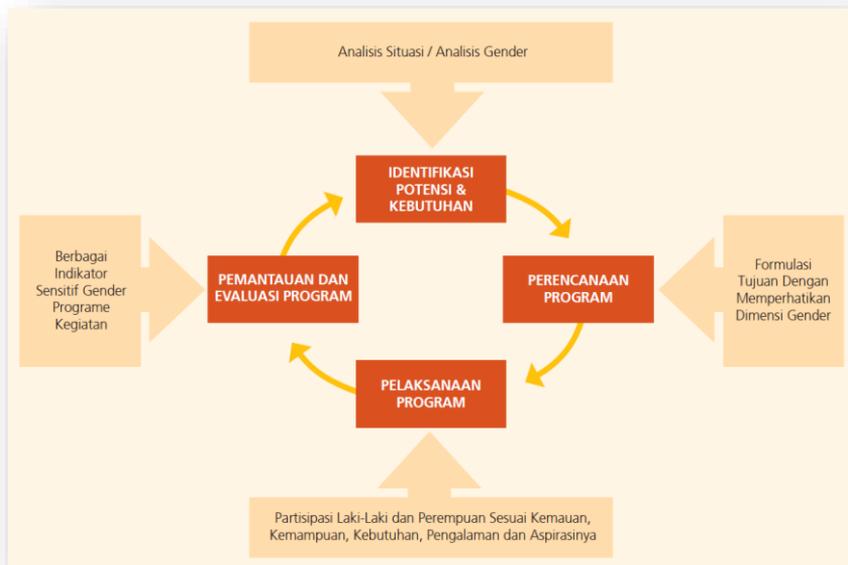
Tujuan evaluasi lebih terfokus kepada penilaian *output* dan *outcome* yang secara rinci bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah PPRG dilaksanakan sesuai standar atau aturan (PMK 104 Tahun 2010 dan PMK yang berlaku pada periode dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi).
2. Mengetahui apakah pelaksanaan PPRG mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.
3. Mengidentifikasi hal-hal penting bagi tindak lanjut atau pengembangan kebijakan di masa yang akan datang.

## KONSEP DAN PELAKSANAAN PPRG

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan Upaya untuk mempercepat penerapan PUG yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan yang selama ini masih ditemukan. Kesenjangan tersebut pada umumnya merupakan akibat dari konstruksi sosial dan budaya

### Mekanisme Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan yang responsif gender



## **ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)**

ARG dibagi menjadi 3 (tiga) kategori :

### **1. Anggaran khusus target gender/anggaran spesifik gender**

Adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki yang didasarkan pada hasil analisis gender

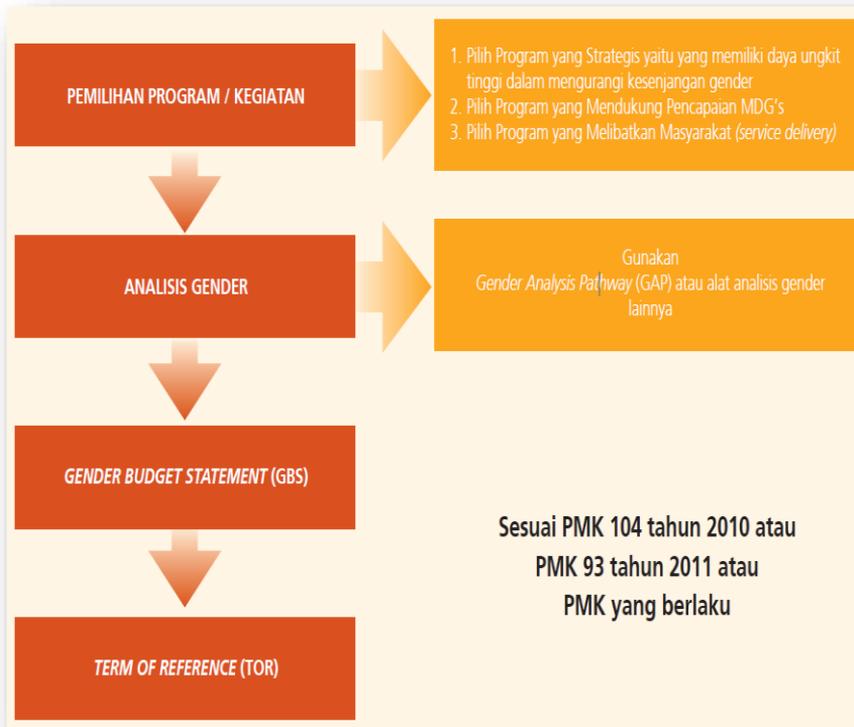
### **2. Anggaran kesetaraan gender**

Adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk mengatasi masalah kesenjangan gender yang diketahui dari analisis gender, yaitu adanya kesenjangan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya

### **3. Anggaran pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG).**

Adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

## LANGKAH-LANGKAH DALAM PENYUSUNAN RKA RESPONSIF GENDER



# KONSEP PEMANTAUAN & EVALUASI PELAKSANAAN PUG

Sebagaimana diatur dalam Peraturan  
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006  
tentang Tata Cara Pelaksanaan  
Pengendalian dan Evaluasi Rencana  
Pembangunan, bahwa proses  
pemantauan dan evaluasi dilaksanakan  
oleh Satuan Kerja (Satker) Pemerintah.  
Dengan demikian, pemantauan dan  
evaluasi merupakan hal yang wajib bagi  
seluruh Satuan Kerja Kementerian/  
Lembaga Pemerintah maupun Satuan  
Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan  
Kabupaten/Kota

# INDIKATOR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT UKUR PEMANTAUAN & EVALUASI PELAKSANAAN PPRG

Indikator yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi ini merupakan indikator kinerja (ukuran besaran) dari setiap tahap pelaksanaan PPRG yang menggambarkan indikator *input*, proses, *output* dan *outcome* (hasil).

---

Pelaksanaan  
PPRG dibagi  
ke dalam 4  
tahap :

Persiapan

---

Perencanaan

---

Pelaksanaan

---

tahap melihat hasil dari  
PPRG tersebut

---

# Pemantauan Pelaksanaan PPRG

NO	TAHAP AN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (sasaran)	INDIKATOR KINERJA	Instrumen
		<b>(INPUT)</b> Prasyarat PUG		Formulir Isian
1	TAHAP PERSIAPAN	1. Komitmen	Peraturan Kepala Daerah terkait	
		2. Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renstra PD yang mengandung isu gender</li> <li>• Renja Tahunan yang mengandung isu gender</li> <li>• Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG di PD</li> <li>• Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG Kota (di tingkat PD)</li> <li>• Kebijakan tentang data terpilah</li> </ul>	
		3. Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• POKJA PUG di kota</li> <li>• Focal Point PD</li> <li>• Rencana kerja POKJA PUG</li> <li>• Laporan kerja POKJA PUG</li> </ul>	
		4. Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim (SDM) terlatih (paham PUG dan PPRG) atau fasilitator Kota</li> <li>• SDM perencana PD memiliki kemampuan dalam</li> <li>• melaksanakan PPRG (sesuai PMK 104/2010 atau PMK yang berlaku)</li> </ul>	
		Sumber Dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran untuk pelembagaan PUG</li> </ul>	
		5. Data terpilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data terpilah tentang program terkait</li> </ul>	
		6. Alat Analisis Gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode analisis gender yang digunakan</li> </ul>	
		7. Peran serta masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum pertemuan dengan LSM terkait pelaksanaan PUG dan PPRG</li> <li>• Anggota POKJA PUG dari Masyarakat</li> </ul>	

NO	TAHAP AN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (sasaran)	INDIKATOR KINERJA	Instrumen
<b>(PROSES)</b>				
2	TAHAP PERENCANAAN	1. Renstra yang terkait dengan isu gender	Program yang mengandung isu gender berdasarkan Renstra PD	
		2. Kegiatan dalam RKA yang mengandung isu gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Output</i> terpilih (yang ada isu gendernya)</li> <li>• Jumlah <i>output</i> yang di targetkan penyusunan</li> <li>• ARGnya untuk tahun berjalan</li> </ul>	
		3. Data terpilih terkait output	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan data terpilih terkait dengan <i>output</i> yang akan disusun ARGnya</li> </ul>	
		4. Proses analisis GAP atau sejenis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil analisis gender</li> </ul>	
<b>(OUTPUT)</b>				
3	TAHAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN PPRG	1. GBS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GBS dari <i>output</i>, <i>suboutput</i>, komponen, sub</li> <li>• komponen yang ada isu</li> <li>• GBS di dasarkan kepada hasil analisis</li> </ul>	
		2. TOR (KAK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KAK untuk setiap <i>output</i> kegiatan</li> <li>• Penyusunan GBS dan KAK mengacu kepada format PMK 104/2010 (PMK yang berlaku)</li> </ul>	
<b>(OUTCOME)</b>				
4	HASIL PPRG	1. Satker yang menyusun PPRG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Satker yang menyusun PPRG</li> </ul>	
		2. Penelaahan GBS dan KAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggapan dari tim penelaah anggaran</li> </ul>	
		3. Anggaran dalam DIPA	Anggaran <i>output</i> , <i>sub output</i> , komponen dan sub komponen yang tersedia (disetujui) dalam DIPA	
		4. Realisasi anggaran dan realisasi kegiatan	Persentasi realisasi anggaran responsif gender yang ada dalam DIPA. Persentasi realisasi kegiatan yang responsif gender (yang ada dalam DIPA) sesuai GBS dan KAK	

# Evaluasi pada aspek-aspek pelaksanaan PPRG

NO	ASPEK	INDIKATOR	METODE
1	<b>Input</b> Sejauh mana SDM PD mengetahui dan memahami Prasyarat PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporsi <i>input</i> yang tersedia.</li> <li>2. Cakupan unit Eselon II yang sudah tersosialisasi dengan Perda PUG</li> <li>3. Proporsi SDM terkait yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG.</li> <li>4. Masalah dan kendala yang dihadapi terkait <i>input</i>?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di analisis dari hasil pemantauan.</li> <li>2. <i>Interview</i> dengan POKJA atau <i>Focal point</i></li> <li>3. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan dan Perencana komponen (penyusun PPRG)</li> </ol>
2	<b>Proses</b> Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporsi <i>output</i> yang ada isu gendernya dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada di PD.</li> <li>2. Proporsi <i>output</i>, <i>sub output</i>, komponen yang dibuat</li> <li>3. GBS nya dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada isu gendernya.</li> <li>4. Kelengkapan data terpilah terkait <i>output</i>.</li> <li>5. Masalah atau kendala selama proses analisis gender</li> <li>6. Solusi dari masalah dan kendala yang ditemui (bila ada).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menelaah RKA PD</li> <li>2. <i>Interview</i> dengan Perencanaan PD</li> </ol>
3	<b>Output</b> Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian isu gender yang ada dalam GBS dengan hasil analisis gender</li> <li>2. Kesesuaian KAK dengan GBS</li> <li>3. Proporsi jumlah GBS dan KAK dibandingkan <i>output</i> ada isu gendernya</li> <li>4. Kesesuaian rencana aksi yang dimuat dalam KAK dengan hasil analisis gender</li> <li>5. Kendala dan masalah dalam membuat GBS dan KAK</li> <li>6. Solusi kendala dan masalah (bila ada)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Interview</i> dengan perencanaan</li> <li>2. Melihat dan menelaah dokumen hasil analisis gender, GBS dan KAK</li> </ol>

# Evaluasi pada aspek-aspek pelaksanaan PPRG

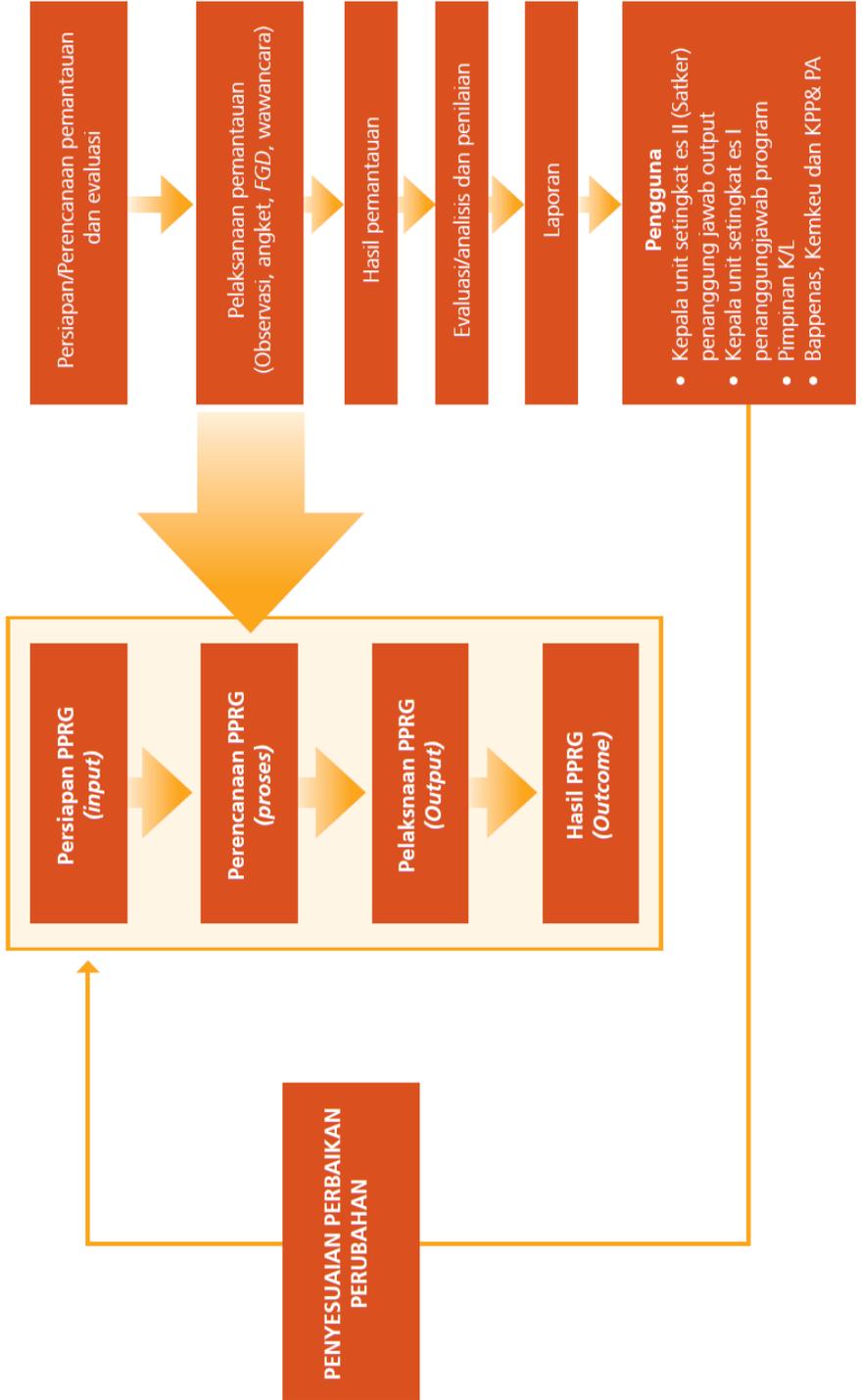
NO	ASPEK	INDIKATOR	METODE
4	<b>Outcomes</b> Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di PD	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Proporsi jumlah Satker yang melaksanakan PPRG dibandingkan Satker yang ada di PD</li><li>2. Proporsi jumlah dana yang disetujui dalam DIPA dibandingkan dengan yang di usulkan dalam GBS dan KAK di masing-masing Satker</li><li>3. Proporsi anggaran <i>output/sub output</i> yang dibuat GBSmnya dibandingkan total anggaran Satker</li><li>4. Proporsi anggaran <i>output/sub output</i> yang ada GBSnya dibandingkan dengan total anggaran <i>Output</i> yang ada isu gendernya</li><li>5. Proporsi Anggaran <i>output/sub output</i> yang ada GBS di seluruh PD dibandingkan total anggaran PD</li><li>6. Proporsi realisasi anggaran yang responsif gender (ada GBS) sesuai format KAK.</li><li>7. Proporsi realisasi kegiatan yang responsif gender (yang ada GBS) dibandingkan dengan yang bukan responsive gender.</li><li>8. Proporsi pencapaian target indikator yang tercantum dalam GBS.</li></ol>	Membandingkan dokumen GBS dan KAK dengan DIPA dan rencana

# PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI

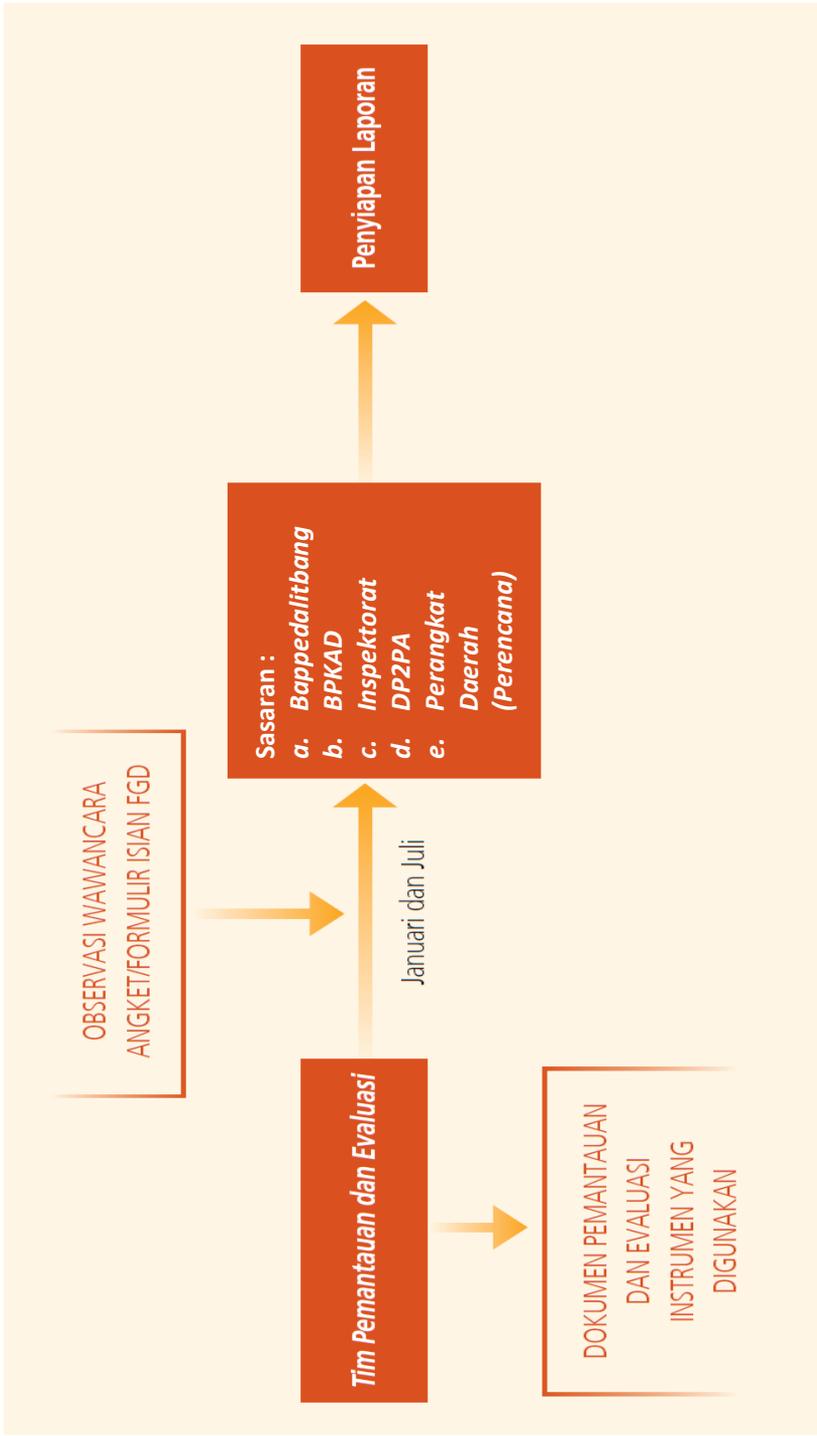
Proses dasar dari pemantauan secara umum meliputi tiga tahap yaitu:

1. menetapkan standar pelaksanaan yang disiapkan pada tahap persiapan;
2. pengukuran;
3. menentukan kesenjangan (*deviasi*) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana

# Prosedur Pemantauan dan Evaluasi



# Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi



# **LAMPIRAN 1**

## **Formulir Isian Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG Kota Samarinda Tahun 2022**





NO	INDIKATOR	ADA / SUDAH	TIDAK ADA / BELUM	KET
6	<p>Apakah substansi gender dalam RPJMD digunakan dalam menyusun RKPd Instansi Saudara? (Sehingga RKPd menjadi Responsif Gender)</p> <p>Jika Ya, apakah hasil analisis gender tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sasaran (Lampirkan)</li> <li>2) Program Prioritas (Lampirkan)</li> <li>3) Indikator Sasaran (Lampirkan)</li> <li>4) Indikator Program (Lampirkan)</li> <li>5) Indikator Kegiatan (Lampirkan)</li> <li>6) Indikator Sub Kegiatan (Lampirkan)</li> </ol>			
7	<p>Apakah substansi gender dalam RKPd digunakan dalam menyusun Renja Instansi Saudara?</p>			
8	<p><b>PENGANGGARAN</b></p> <p><b>Anggaran Responsif Gender :</b></p> <p>Apakah terdapat kegiatan/sub kegiatan responsive gender di instansi saudara?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika ya. Mohon lampirkan GAP/GBS atau kegiatan yang tertuang dalam renja sesuai bidang pembangunan?</li> </ol> <p><b><i>Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan</i></b></p> <p>Nama Kegiatan ...</p> <p>Sub Kegiatan ... Rp...</p> <p>Sub Kegiatan ... Rp...</p> <p>Total Anggaran RG Rp....</p> <p>Total Pagu Anggaran PD Rp....</p> <p><b><i>Bidang Hukum</i></b></p> <p>Nama Kegiatan ...</p> <p>Sub Kegiatan ... Rp...</p> <p>Sub Kegiatan ... Rp...</p> <p>Total Anggaran RG Rp....</p> <p>Total Pagu Anggaran PD Rp....</p>			

NO	INDIKATOR	ADA / SUDAH	TIDAK ADA / BELUM	KET
	<p><b><i>Bidang Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, dll)</i></b>  Nama Kegiatan ...  Sub Kegiatan ... Rp...  Sub Kegiatan ... Rp...  Total Anggaran RG Rp....  Total Pagu Anggaran PD Rp....</p> <p><b><i>Bidang Ekonomi (Ketenagakerjaan, Kewirausahaan, dll)</i></b>  Nama Kegiatan ...  Sub Kegiatan ... Rp...  Sub Kegiatan ... Rp...  Total Anggaran RG Rp....  Total Pagu Anggaran PD Rp....</p> <p><b><i>Bidang Lainnya</i></b>  Nama Kegiatan ...  Sub Kegiatan ... Rp...  Sub Kegiatan ... Rp...  Total Anggaran RG Rp....  Total Pagu Anggaran PD Rp....</p> <p><b>PELAKSANAAN</b>  <b><i>Output yang mendukung pemberdayaan Perempuan</i></b>  <i>Apa output dari kegiatan/sub kegiatan responsif gender, kegiatan afirmasi dan/atau kegiatan pemberdayaan perempuan pada masing-masing bidang?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan</i></li> <li>b. <i>Bidang Hukum</i></li> <li>c. <i>Bidang Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, dll)</i></li> <li>d. <i>Bidang Ekonomi (Ketenagakerjaan, Kewirausahaan, dll)</i></li> </ol>			

NO	INDIKATOR	ADA / SUDAH	TIDAK ADA / BELUM	KET
2	<p><b>Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif Gender</b></p> <p>Apakah Instansi anda memiliki program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender hingga tingkat desa/ kelurahan? (contoh: Kabupaten/Kota Peduli HAM, Desa Wisata, dll)</p> <p>Jika ya, mohon lampirkan bukti pendukungnya.</p>			
3	<p><b>Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender</b></p> <p>Apakah Instansi saudara memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender?</p> <p>a. Ruang Laktasi, jika ya (lampirkan) b. Tempat Penitipan Anak (TPA), jika ya (lampirkan) c. Layanan Pengaduan Kekerasan, jika ya (lampirkan)</p>			
4	<p><b>Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA)</b></p> <p>Apakah Kelurahan saudara telah menginisiasi pembentukan/Penguatan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA)?</p>			

NO	INDIKATOR	ADA / SUDAH	TIDAK ADA / BELUM	KET
5	<p><b>PEMANTAUAN</b></p> <p><b>PUG Dalam Evaluasi</b> Apakah Instansi anda ikut serta dalam Evaluasi Penyelenggaraan PUG setiap tahun?</p> <p>Apakah hasil evaluasi penyelenggaraan PUG di instansi saudara ditindaklanjuti?</p>			
6	<p><b>PENGAWASAN</b></p> <p><b>PUG dalam Pengawasan</b> Apakah APIP/Inspektorat memberikan rekomendasi Penyelenggaraan PUG? (Kelengkapan dokumen kepatuhan dan kualitas)</p>			
7	<p><b>PELAPORAN</b></p> <p><b>PUG dalam Pelaporan</b> Apakah Instansi Saudara telah melaporkan Penyelenggaraan PUG dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LAKIP (Lampirkan)</li> <li>• LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) (Lampirkan)</li> <li>• LPPD (Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) (Lampirkan)</li> </ul>			
8	<p><b>INOVASI</b></p> <p><b>Inovasi Penyelenggaraan PUG yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender</b> Apakah Instansi Saudara memiliki inovasi Penyelenggaraan PUG yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender? Jika Ya, Jelaskan dan lampirkan buktinya</p>			

**Informasi Lebih Lanjut :  
Hubungi KLINIK PPRG  
0812-3008-1982  
Nanang Supratman**